

Penanggung Jawab:

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Pemimpin Redaksi:

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. (Hubungan Internasional)

Dewan Redaksi:

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. (Hubungan Internasional)

Riris Katharina, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara)

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. (Hubungan Internasional)

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. (Komunikasi Politik)

Pelaksana Redaksi:

Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Dewi Sendhikasari D., S.IP., M.P.A.

Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Siti Chaerani Dewanti., Ars., M.Si

Aulia Fitri., S.IP., M.Si (Han).

Staff Redaksi:

Sri Rejeki, S.E., Yeti Ifana, S.E., Supriyanto

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Vedi R. Hadiz (University of Melbourne)

Prof. PD. Dr. Patrick Ziegenhain (University of Malaya)

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun (Universitas Indonesia)

Dr. phil. Yandri Kurniawan (Universitas Indonesia)

Dr. Panji Anugrah Permana, S.IP., M.Si (Universitas Indonesia)

Iis Gindarsah, M.Si (CSIS)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I, Lt. 2

Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270

Telp: 021-5755987 Fax: 021-5756067

Email: jurnal.politica@dpr.go.id

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i
● KOALISI DAN PENGELOLAAN KOALISI, PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA <i>oleh: Efriza</i>	1-16
● KEBIJAKAN SEKURITISASI DAN PERSEPSI ANCAMAN DI LAUT NATUNA UTARA <i>oleh: Ramdhan Muhaimin</i>	17-37
● EAST ASIA REGIONAL LEADERSHIP DYNAMIC IN MEGA-REGIONAL AGREEMENT ERA <i>oleh: Anggara Raharyo dan Sheiffi Puspapertiwi</i>	39-58
● INDONESIA AND RUSSIA RELATIONS IN RESPONSE WITH CHANGING STRATEGIC ENVIRONMENT <i>oleh:Hendra Manurung</i>	59-72
● TUGAS PERBANTUAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME <i>oleh:Aulia Fitri</i>	73-89

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal *Politica* merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti dan masyarakat akademis untuk menyampaikan ide dan/atau gagasan yang terkait dengan dinamika politik dalam negeri dan luar negeri. Memasuki volume kesembilan tahun 2018, Jurnal *Politica* secara konsisten tetap menyajikan berbagai tulisan ilmiah di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Berbagai persoalan strategis dibahas oleh 5 (lima) penulis dalam Jurnal *Politica*, Volume 9, Nomor 1, Mei 2018. Keempat persoalan strategis tersebut menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan persoalan pemerintahan, keamanan laut, kepemimpinan ekonomi politik, isu perdagangan Indonesia-Rusia, dan tugas pembantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Tulisan Pertama Disajikan Oleh Efriza Dengan Judul “Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.” Tulisan ini membahas relasi Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengelolaan koalisi berdasarkan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan akibat dari perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai. Menggunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial, dilengkapi juga dengan beberapa pemikiran lainnya mengenai Koalisi. Berdasarkan realitas dan pemikiran di atas, dihasilkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah pengelolaan koalisi bersifat “gemuk” dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan.

Tulisan kedua berjudul “Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara,” yang ditulis oleh Ramdhan Muhaimin. Menurut penulis, salah satu pembaharuan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia terbaru yang diterbitkan tahun lalu adalah penamaan Laut Natuna Utara di sebelah utara Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, perairan tersebut masuk dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama kawasan perairan ini dalam peta terbarunya mendapat protes keras dari pemerintah Tiongkok. Sebab kawasan yang dinamai pemerintah Indonesia sebagai Laut Natuna Utara diklaim pemerintah Tiongkok masuk ke dalam Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta tradisional Tiongkok. Tentu ada aspek politik dan keamanan dalam penamaan kawasan tersebut sehingga memicu kritik keras dari Tiongkok menyusul dinamika konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan selama ini. Oleh karena itu, kajian ini mencoba menganalisis aspek keamanan pada kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Persepsi Ancaman (*Threat Perception*) dan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan Mazhab Copenhagen (*Copenhagen School*).

Tulisan ketiga disajikan oleh Anggara, dkk dengan judul “*East Asia Regional Leadership Dynamic in Mega-Regional Agreement Era.*” Penulis menilai mega regional telah menjadi tren utama dalam politik ekonomi era kontemporer. Negosiasi mega regional yang banyak diperbincangkan berpusat pada Asia Timur, di mana *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Trans Pacific Partnership (TPP)* dikontestasikan dengan satu sama lain. Keduanya menjanjikan solusi dan peningkatan dari stangnansi multilateralisme dan redundansi perjanjian perdagangan regional. Keduanya juga menjanjikan kemungkinan regionalism di Asia Timur, sebagai konsekuensi yang tidak

dapat dihindari dari integrasi yang intensif dari kerangka rezim yang ada. Kepemimpinan regional kemudian menjadi isu yang penting, karena kekuatan besar seperti Jepang, China, dan ASEAN akan mencoba untuk menjadi pemimpin kawasan. Di tengah negosiasi negara peserta untuk segera menyelesaikan negosiasi panjang RCEP, peristiwa penting terjadi di mana AS mundur dari TPP serta dibentuknya *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP)* sebagai penggantinya. Peristiwa ini telah menciptakan disrupsi terhadap regionalism Asia Timur, di mana peristiwa tersebut menciptakan arena yang baru bagi Jepang, sehingga mengubah keseimbangan dinamika kepemimpinan regional.

Tulisan keempat disajikan oleh Hendra Manurung dengan judul “Visi Masyarakat Asean 2025: Hubungan Perdagangan Indonesia Dan Rusia.” Penulis menilai Indonesia penting bagi Rusia bukan hanya sebagai mitra di level dunia, tetapi juga sebagai negara yang memiliki peran kunci dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Melalui hubungan kemitraan Rusia dan ASEAN, peta jalan untuk kerjasama ekonomi disepakati dan dilaksanakan. Lebih dari dua dekade, kerjasama ekonomi antara Rusia dan Asia Tenggara tertinggal di belakang kerjasama politik. Saat ini merupakan waktu tepat menutup kesenjangan tersebut. Bagaimanapun, untuk menguatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, diperlukan keseriusan untuk mengatasi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan birokrasi dan kurangnya informasi. Rusia penting bagi Indonesia demikian sebaliknya dalam mewujudkan stabilitas kawasan Indo-Pasifik sebagai mitra yang dipercaya dan menjanjikan dalam alih teknologi dan inovasi teknologi di sektor ekonomi dan kerjasama pertahanan.

Tulisan kelima dalam Jurnal *Politica* kali ini ditulis oleh Aulia Fitri dengan judul tulisan “Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme.” Pemerintah Indonesia mengesahkan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari *criminal justice model* yang mengedepankan penegakan hukum, ke *war model* yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Penulis membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan *criminal justice model*, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Demikianlah pengantar atas kelima tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini. Berbagai tulisan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan juga alternative pemikiran bagi para pembaca yang menaruh perhatian terhadap isu-isu yang dibahas dalam jurnal ini. Redaksi juga berharap agar tulisan-tulisan ini dapat menjadi referensi bagi yang membutuhkan terutama para pengambil kebijakan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Lili Romli., M.Si (Peneliti Utama LIPI), Dr. Ganewati Wuryandari (Peneliti Utama LIPI), dan Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy sebagai Mitra Bestari atas koreksi dan masukannya terhadap tulisan dalam Jurnal *Politica* edisi kali ini.

Jakarta, Mei 2018

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Efriza

Koalisi dan Pengelolaan Koalisi, ada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Tulisan ini membahas relasi Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengelolaan koalisi berdasarkan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan akibat dari perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai. Awalnya, Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk mewujudkan koalisi yang berbasis ideologis dan program yang sama (consensus coalition) antar partai politik, namun realitasnya, sulit mewujudkannya disebabkan stabilitas pemerintahan terganggu di awal pemerintahan, akhirnya Presiden Jokowi memilih mewujudkan koalisi "semua partai." Menggunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial, dilengkapi juga dengan beberapa pemikiran lainnya mengenai Koalisi. Berikutnya, dilengkapi analisis dari Otto Kirchheimer tentang Catch All Party, untuk menguraikan transformasi kepartaian di era modern ini. Disertai pembahasan mengenai orientasi partai-partai politik di Indonesia, berdasarkan uraian Yasraf Amir Piliang tentang nomadisme politik. Berdasarkan realitas dan pemikiran di atas, dihasilkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah pengelolaan koalisi bersifat "gemuk" dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan. Pengelolaan koalisi itu dapat dilakukan karena pilihan partai bergabung sebagai pendukung pemerintahan turut didasari bukan saja kebutuhan pencitraan politik berdasarkan dorongan elektoral dalam pasar politik, tetapi juga dalam upaya partai politik tersebut mendanai kelangsungan hidupnya.

Kata Kunci: pengelolaan koalisi, Joko Widodo, Jusuf Kalla, sistem multipartai, sistem presidensial, DPR

Efriza

Coalition and Coalition Management In Joko Widodo-Jusuf Kalla Administration

This paper discusses the relationship between the President and the House of Representatives and the coalition government based on the three years of President Joko Widodo (Jokowi), who was trapped in inter-institutional competition as a consequence of a mixture of presidential and multi-party systems. Initially, President Jokowi has the desire to realize a coalition based on ideology and the same program (consensus coalition) between political parties, but the reality, it is difficult to make it happen in government, finally President Jokowi re-elected a coalition of "all parties". Using some of the basics of Scott Mainwaring and David Altman about presidential and multiparty combination systems and coalitions in presidential systems, complemented by several Coalitions. Then, complete the results of Otto Kirchheimer on Catch All Party, to outline the transformation of the party in this modern era. Accompanied by discussions on political parties in Indonesia, based on Yasraf Amir Piliang's description of political nomadism. Based on the facts and outcomes, a combination of presidential and multiparty systems and the government's management of government by President Jokowi, which manages a "fat" coalition with accommodative leadership and transactional performances. Matters relating to the harmonious relationship between the President and the House of Representatives with the consequence that the President is committed to realizing an unconditional coalition and not for the power-seats. Coalition management can be done because the choice of the party that develops as a supporter of the government is also based not only on the need for political imagery in order to encourage electoral in the political market, but also in the spirit of the party.

Keywords: coalition management, Joko Widodo, Jusuf Kalla, multiparty system, presidential system, DPR

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Ramdhan Muhaimin

Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara

Salah satu pembaharuan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia terbaru yang diterbitkan tahun lalu adalah penamaan Laut Natuna Utara di sebelah utara Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, perairan tersebut masuk dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama kawasan perairan ini dalam peta terbarunya mendapat protes keras dari pemerintah Tiongkok. Sebab kawasan yang dinamai pemerintah Indonesia sebagai Laut Natuna Utara diklaim pemerintah Tiongkok masuk ke dalam Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta tradisional Tiongkok. Tentu ada aspek politik dan keamanan dalam penamaan kawasan tersebut sehingga memicu kritik keras dari Tiongkok menyusul dinamika konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan selama ini. Kebijakan penamaan Laut Natuna Utara tidak bisa dilihat sebagai kebijakan pertikular yang tidak terkait sama sekali dengan tindakan politik lainnya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sebelumnya, seperti pembuatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) hingga peningkatan kapasitas militer di sekitar perairan Natuna. Termasuk visi maritim Pemerintah Indonesia yang termuat dalam Nawa Cita. Oleh karena itu, kajian ini mencoba menganalisis aspek keamanan pada kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Persepsi Ancaman (Threat Perception) dan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan Mazhab Copenhagen (Copenhagen School). Tujuan pendekatan konseptual dalam studi keamanan ini, untuk melihat sejauh mana kebijakan penamaan Laut Natuna Utara dapat dilihat sebagai upaya sekuritisasi kedaulatan kepentingan nasional Indonesia dari ancaman eksternal.

Kata Kunci: Peta baru NKRI, Laut Natuna Utara, Laut Tiongkok Selatan, Persepsi Ancaman, Sekuritisasi

Ramdhan Muhaimin

The Policy Of Securitization and Threat Perception In The North Natuna Sea

The Government of the Republic of Indonesia was reformed a number of strategic parts in its national map in the middle of last year. One of them is renaming the waters in north of Natuna Island as the North Natuna Sea. Previously, the area became part of the South China Sea refers to the world map. Certainly, the policy was surprised the Government of the People's Republic of China, which immediately issued strong protests. China claimed the area which named by Indonesia as the North Natuna Sea is part of its nine-dash line. There were political and security aspects in the Indonesian policy to renaming the waters, which brought out a new problem in dynamic of the South China Sea. Moreover, the renaming policy cannot be seen as particular action that not related at all with Indonesian previous policies, such as Djuanda Declaration on sea boarder, policy of ALKI (Indonesian Archipelagic Sea Lane), until increasing military base capacity in Natuna. Furthermore, Indonesian government under Joko Widodo's administration has a maritime vision to make Indonesia as Global Maritime Fulcrum. Therefore, this study attempts to analyze the security aspects of the policy using the Threat Perception and Securitization Theories developed by the Copenhagen School. The purpose of this conceptual approach is to see how far renaming policy can be seen as an attempt to securitize the sovereignty of Indonesia's national interest from external threats.

Keywords: New Map of NKRI, North Natuna Sea, South China Sea, Threat Perception, Securitization

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Anggara Raharyo dan Sheiffi Puspapertiwi

Dinamika Kepemimpinan Regional Asia Timur dalam Era Perjanjian Mega-Regional

Mega regional telah menjadi tren utama dalam politik ekonomi era kontemporer. Negosiasi mega regional yang banyak diperbincangkan berpusat pada Asia Timur, di mana Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans Pacific Partnership (TPP) dikontestasikan dengan satu sama lain. Keduanya menjanjikan solusi dan peningkatan dari stangnansi multilateralisme dan redundansi perjanjian perdagangan regional. Keduanya juga menjanjikan kemungkinan regionalism di Asia Timur, sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari integrasi yang intensif dari kerangka rezim yang ada. Kepemimpinan regional kemudian menjadi isu yang penting, karena kekuatan besar seperti Jepang, China, dan ASEAN akan mencoba untuk menjadi pemimpin kawasan. Di tengah negosiasi negara peserta untuk segera menyelesaikan negosiasi panjang RCEP, peristiwa penting terjadi di mana AS mundur dari TPP serta dibentuknya Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP) sebagai penggantinya. Tulisan ini bertujuan untuk memahami konstelasi kepemimpinan ekonomi politik Asia Timur, dikaitkan dengan perkembangan dari perjanjian perdagangan mega-regional yang melibatkan kawasan ini. Kami menggunakan konsep “kepemimpinan” dan “kepemimpinan kawasan” sebagai kerangka konseptual dalam tulisan ini. Metode kualitatif digunakan dalam studi ini dengan data yang diperoleh dari jurnal terbaru dan buku melalui studi literatur. Berdasarkan analisa yang dilakukan, kami berargumen bahwa peristiwa ini telah menciptakan disrupsi terhadap regionalism Asia Timur, di mana peristiwa tersebut menciptakan arena yang baru bagi Jepang, sehingga mengubah keseimbangan dinamika kepemimpinan regional. Sebagai akhir dari studi yang kami lakukan, selanjutnya kami menawarkan skenario bagi tiap kekuatan besar Asia Timur, membuka diskusi awal sebagai respon dari peristiwa yang terjadi.

Kata kunci: Asia Timur, ASEAN, China, Jepang, kepemimpinan regional, RCEP, TPP, CPTPP

Anggara Raharyo dan Sheiffi Puspapertiwi

East Asia Regional Leadership Dynamic In Mega-Regional Agreement Era

Mega-regional has become a major trend of the global political economy in this contemporary era. The most talked mega-regional negotiations are centered in East Asia, where Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and Trans-Pacific Partnership (TPP) seemed to be contested toward each other. The two mega-regional negotiations promised solution and advancement from stagnant multilateralism and regional trade agreement redundancy. Both regimes also promised possibility for East Asia regionalism, as an inevitable consequence of deeper integration created by the two regimes. Regional leadership is thus becoming a prominent issue, as great powers such as Japan, China, and ASEAN, will struggle to become a regional leader. While participating countries are motivated to conclude negotiation, major event occurred with the withdrawal of the US from TPP and the establishment of its successor, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). This study is aimed to understand East Asia political economy leadership constellation, regarding the current development of mega-regional trade agreements involving the region. We use “leadership” and “regional leadership” as our conceptual frameworks. We use the qualitative method in our study, in which data is obtained from the latest journals and books through literature review. Based on our analysis, we argue that this major shock event has created disruption in East Asia Regionalism, as it provided a new playing field for Japan, changing the balance of regional leadership. To conclude our study, we also propose scenarios for each East Asia great power as an initial discussion responding to this changing event.

Keywords: East Asia, ASEAN, China, Japan, regional leadership, RCEP, TPP, CPTPP

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Hendra Manurung

Hubungan Indonesia dan Rusia dalam Merespons Perubahan Lingkungan Strategis

Hubungan Indonesia dan Rusia semakin dekat setelah penandatanganan draf perjanjian kemitraan strategis di Moskow. Rencana Konsultasi 2017-2019, yang bertujuan untuk mengintensifkan dialog kedua negara, telah ditandatangani Menlu kedua negara. Indonesia penting bagi Rusia bukan hanya sebagai mitra di level dunia, tetapi juga sebagai negara yang memiliki peran kunci di Asia Tenggara. Lebih dari dua dekade, kerja sama ekonomi antara Rusia dan Asia Tenggara tertinggal di belakang kerja sama politik. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menutup kesenjangan tersebut dengan menguatkan hubungan ekonomi dan perdagangan. Namun, diperlukan keseriusan untuk mengatasi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan birokrasi dan kurangnya informasi. Tulisan ini menjelaskan hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia dalam periode beberapa tahun terakhir. Penulis berpendapat Rusia penting bagi Indonesia, demikian pula sebaliknya, karena kedua negara saling membutuhkan dalam kerangka kerja sama ekonomi dan pertahanan.

Kata kunci: kerja sama ekonomi, hubungan perdagangan, kerja sama pertahanan, Rusia, Indonesia, lingkungan strategis

Hendra Manurung

Indonesia and Russia Relations in Response with Changing Strategic Environment

Relations between Indonesia and Russia seem to be getting closer after agreeing to speed up the drafting of a new strategic partnership agreement in Moscow. A Plan of Consultation for 2017-2019 was signed by Ministers Retno L.P Marsudi and Sergey Lavrov aimed at intensifying dialogue between the two countries. Indonesia is important to Russia not only as a partner on international level, but as a country that plays a major role in the Southeast Asia. Under the Russia-ASEAN dialogue partnership, a road map for economic cooperation has been agreed upon and implemented. Over the past two decades, economic cooperation between Russia and Southeast Asia has lagged behind political cooperation. The writer argues efforts to strengthen closer trade and economic cooperation are needed to overcome existing barriers. This paper attempts to elaborate Indonesia-Russia trade relations in searching for a new strategic partnership. It is further argued that Russia is important to Indonesia and vice versa considering both countries are promising and reliable partner in economy and defense cooperation.

Keywords: economic cooperation, trade relation, defense cooperation, Russia, Indonesia, strategic environment

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Aulia Fitri

Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme

Pemerintah Indonesia mengesahkan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Lebih jauh, pengaturan mengenai teknis pelibatan TNI melalui tugas perbantuan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan maksimal satu tahun setelah pengesahan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari criminal justice model yang mengedepankan penegakan hukum, ke war model yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Tulisan ini membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan criminal justice model, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Kata kunci: Operasi Militer Selain Perang, Tugas Perbantuan Militer, Tentara Nasional Indonesia, terorisme.

Aulia Fitri

Military Assitance in Counter-Terrorism

The Indonesian government ratified the revision of the Terrorism Criminal Act which one of the articles regulates the involvement of TNI through the military assistance task in counter terrorism. Furthermore, the regulation regarding the technical involvement of TNI through military assistance will be regulated in a Presidential Regulation, which will be issued a maximum of one year after the ratification of the revised Law on Terrorism. The involvement of the TNI in counter terrorism has triggered public concerns about the possibility of a shift in the mechanism to handle terrorism in Indonesia from criminal justice models that promote law enforcement, to war models that promote the mobilization of military capacity. Even though in practice, the involvement of the TNI was made possible through Military Operations Other Than War. However, Indonesia does not have technical arrangements regarding the mechanism of military assistance. This paper discusses the scheme of involving TNI in counter terrorism within the framework of Military Operation Other Than War with criminal justice model approach, including important points that need to be regulated in the Presidential Regulation concerning military assistance in counter terrorism.

Keywords: Military Operation Other Than War, Military Assistance, Indonesian National Army, terrorism